

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Tanti Apriyani dan Ardi Gunawan (2022)** dengan penelitian yang berjudul **"Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu (RTLH) Di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri"** Faculty of Law, Arts and Social Sciences, Universitas Gunung Kidul (UGK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program bedah rumah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat serta memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu pemerintah desa serta masyarakat penerima bantuan program bedah rumah. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Husain (2002) yang menekankan pada empat pendekatan utama, yaitu pendekatan sasaran (ketepatan penerima program), pendekatan sumber (ketersediaan sumber daya), pendekatan proses (pelaksanaan program), dan pendekatan integratif (keterpaduan antara input, proses, dan output

program). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah di Desa Sumberagung telah berjalan secara efektif, ditandai dengan ketepatan sasaran penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria dari Kementerian PUPR, serta pelaksanaan program yang berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Program ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian menjadi lebih layak dan sehat. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu adanya sebagian penerima bantuan yang tidak mengikuti ketentuan ukuran rumah yang telah ditetapkan sehingga melakukan penambahan luas bangunan secara mandiri, yang berdampak pada pembengkakan biaya dan berpotensi menghambat proses penyelesaian pembangunan.

2. **Pika Aulia Wati dkk. (2023)** dengan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”** Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan program, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kendala dalam proses pelaksanaan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat pemerintah desa serta masyarakat penerima

bantuan program. Dalam menganalisis efektivitas program, penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007) yang meliputi beberapa indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Telukjambe telah berjalan efektif, ditandai dengan sebagian besar indikator efektivitas telah terpenuhi, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan serta terlaksananya sosialisasi dan pemantauan program. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi atau miscommunication antara pihak pelaksana dengan pemerintah desa dalam proses pemantauan, sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal.

Untuk menempatkan penelitian ini, penulis menyajikan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun pada penelitian ini lebih mengarah Efektivitas Program bantuan bedah rumah di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih jelasnya berikut tabel perbandingan penelitian.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tanti Apriyani dan Ardi Gunawan (2022) <i>Faculty of</i>	Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah di Desa Sumberagung	Sama - sama meneliti tentang Efektivitas Program	Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu

	<i>Law, Arts and Social Sciences,</i> Universitas Gunung Kidul (UGK)	Yang Kurang Mampu (RTLH) Di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri	telah berjalan secara efektif, ditandai dengan ketepatan sasaran penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria dari Kementerian PUPR, serta pelaksanaan program yang berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu adanya sebagian penerima bantuan yang tidak mengikuti ketentuan ukuran rumah yang telah ditetapkan sehingga melakukan penambahan luas bangunan secara mandiri, yang berdampak pada pembengkakan biaya dan berpotensi menghambat proses penyelesaian pembangunan.	Bantuan Bedah Rumah.	dengan penulis, dan teori yang diambil.
--	---	---	--	-----------------------------	--

2	Pika Aulia Wati dkk. (2023) Program Studi Ilmu Pemerintahan , Universitas Singaperbangsa Karawang.	Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Telukjambe telah berjalan efektif, ditandai dengan sebagian besar indikator efektivitas telah terpenuhi, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan serta terlaksananya sosialisasi dan pemantauan program. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi atau miscommunication antara pihak pelaksana dengan pemerintah desa dalam proses pemantauan, sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal.	Sama - sama meneliti tentang Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah.	Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis, dan teori yang diambil.
---	--	--	---	---	---

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Sawir (2020:125), konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Dalam Hidayat dkk (2024:8) mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan suatu tindakan, kegiatan atau proses. Ini mengacu pada sejauh mana suatu upaya atau usaha mencapai hasil yang diharapkan atau ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mahmudi dalam Hertati (2020:22) “Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.”

Menurut Handoko dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021:96) “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Menurut Supriyono dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:40-41) “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.”

Menurut Komaruddin dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:96) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Menurut Mardiasmo dalam Siregar, dkk, (2023:18) “Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa berhasil atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi tersebut dianggap berjalan dengan efektif. Mengevaluasi seberapa baik hubungan antara target penerimaan pajak dan hasil pungutan pajak itu sendiri dikenal dengan efektivitas.”

Menurut Mahmudi dalam Siahaan dan Pardede (2022:90), “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.”

Menurut Hidayat dalam Angrayni dan Yusliati (2018:13) “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”

Menurut Harbani Pasolong dalam Zohriah (2023:90) “Efektivitas berasal dari kata efek dan menggunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas memiliki arti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain sasaran tercapai dengan adanya proses kegiatan tersebut.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau

akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kegiatan atau program tersebut.

b. Teori Efektivitas

Menurut pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Mudiana, dkk (2024:17-18) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian - bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) sasaran merupakan target yang kongkrit, (c) dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) prosedur (b) proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan - perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) peningkatan kemampuan, dan (b) sarana dan prasarana.

Menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3) Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal pemerintah.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program sebagai sesuatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Sudarwan Danim dalam Mudiana, dkk (2024:15) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Menurut Budiani dalam Dedi Amrizal (2018:59) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini:

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi Program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

c. Kriteria Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting dalam ilmu administrasi yang menekankan pada ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak hanya diukur dari minimnya kesalahan, tetapi juga dari kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, serta mengimplementasikan pemikiran rasional ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, efektivitas menjadi landasan utama bagi individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan secara optimal, serta selalu

berkaitan erat dengan rasionalitas dan efisiensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Gibson, Et. al dalam Mutiarin & Zaenudin (2021:98) menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan ke dalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :

- 1) Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*).
- 2) Efektivitas jangka menengah, meliputi, kemampuan menyesuaikan diri (*adaptivenees*), dan mengembangkan diri (*development*).
- 3) Efektivitas jangka panjang, keberlangsungan (*sustainblity*).

Adapun Kriteria efektivitas menurut Makmur (2015:7-9) yang terdiri dari beberapa unsur-unsurnya antara lain:

- 1) Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyalahgunakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

- 2) Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur, atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5) Ketepatan berpikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa

dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8) Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Kriteria efektifitas suatu program dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat pada ukuran pencapaian tujuan. S.P. Siagian dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:37-38) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria efektifitas, yaitu:

1) Kejelasan tujuan terhadap apa yang akan dicapai

Kejelasan tujuan ini dimaksudkan supaya tenaga manusia yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan melihat "pada jalan" yang diikuti para pelaksana agar tidak tersesat sebagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Proses yang dimaksud ini berkorelasi dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan saat ini apa yang dikerjakan organisasi di masa depan.

5) Penyusunan program yang tepat

Penyusunan program yang tepat sesuai rencana harus dijabarkan dengan cermat pelaksanaannya sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan program akan mencapai atau tidaknya efektif dan efisien, harus dibarengi dengan pencapaian sasarannya terukur.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian harus memiliki sifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna.

d. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas. Untuk memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuwan mengemukakan berbagai macam bentuk pendekatan dalam efektivitas.

Pendekatan efektivitas suatu program menurut Dedi Amrizal, dkk (2018:44-46) menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan dalam efektivitas yaitu:

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam

sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Martani dan Lubis dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:39) memberikan pandangannya yaitu ada tiga pendekatan kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, yakni:

1) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber dengan mengukur efektivitas dari input. Fokus pendekatan sumber adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pendekatan proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menekankan pada melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal organisasi.

3) Pendekatan sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran (*goals approach*) memusatkan perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana.

Ali Muhidin dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:40-41) menjelaskan beberapa pendekatan efektivitas sebagai bahan evaluasi yaitu:

1) Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*)

Pendekatan eksperimen ini berasal dari kontrol eksperimen yang umumnya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya secara umum memperoleh kesimpulan tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

2) Pendekatan berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Pendekatan dengan orientasi pada tujuan memakai tujuan program itu sendiri sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini dipandang sangat wajar dan praktis dalam sebuah desain pengembangan program. Pendekatan dengan orientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*) memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

3) Pendekatan berfokus pada keputusan (*The Decision Focused Approach*)

Pendekatan berfokus pada keputusan memberi menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini melihat pentingnya informasi dalam membantu para pengelola program. Hasil dari evaluasi ini mensyaratkan kekuatan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

4) Pendekatan berorientasi pada pemakai (*The User Oriented Approach*)

Pendekatan berorientasi pada pemakai memfokuskan pada masalah penggunaan evaluasi dan memberi penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utama pendekatan berorientasi pada pemakai terletak pada pemakaian informasi secara potensial. Sejumlah elemen cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi sudah sejak dini disadari oleh para evaluator, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan berorientasi pada pemakai, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi penting artinya, namun tidak terpenting cara pemakaian informasi.

5) Pendekatan responsif (*The Responsive Approach*)

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi memberi penekanan pada mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator umumnya akan menghindari hanya satu jawaban yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik dalam mengevaluasi program. Evaluator mencari cara untuk menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan pandangan orang-orang dalam melukiskan atau menguraikan kenyataan. Jadi, dapat dipahami tujuan evaluasi adalah memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

2. Program Bedah Rumah

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong ketersediaan hunian layak huni

bagi masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya melalui program bedah rumah gratis. Program bedah rumah adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan. BSPS diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar bisa memiliki rumah layak huni. Adapun, target dari program ini adalah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Indonesia.

Aturan bedah rumah pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Program Bedah Rumah. Dalam Permen tersebut, BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Pada buku Ekosistem Perumahan yang disusun oleh Arief Sabaruddin, melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni berupa bantuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rumahnya dalam bentuk dana hibah. Jadi, BSPS atau program bedah rumah pemerintah menysasar hunian milik masyarakat dengan kondisi memprihatinkan alias tidak layak huni, termasuk rumah yang rusak akibat terdampak bencana alam, serta hunian tradisional dengan ukuran maksimal 45 meter persegi.

Program BSPS terbagi dalam dua sub-program, terdiri dari Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). Berikut rincian dari kedua sub-program BSPS:

a. PKRS

PKRS adalah kegiatan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni hingga menjadi layak untuk dihuni. Kegiatan ini diselenggarakan atas prakarsa masyarakat, baik secara perorangan atau berkelompok. Berikut sejumlah syarat dalam penyelenggaraan PKRS:

- 1) Peningkatan kualitas rumah atau perbaikan rumah.
- 2) Keselamatan bangunan.
- 3) Kesehatan penghuni.
- 4) Kecukupan minimum luas bangunan.

b. PBRS

PBRS adalah kegiatan untuk membangun rumah baru layak huni. Kegiatan ini juga diselenggarakan atas prakarsa masyarakat, baik secara individu atau berkelompok. Terdapat beberapa syarat penyelenggaraan kegiatan PKRS, di antaranya:

- 5) Pembangunan rumah baru atau pengganti rumah rusak total.
- 6) Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.
- 7) Keselamatan bangunan.
- 8) Kesehatan penghuni.
- 9) Kecukupan minimum luas bangunan.

Tidak semua golongan masyarakat bisa mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah tersebut. Terdapat beberapa syarat bagi subjek maupun objek penerima program bedah rumah pemerintah, meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berkeluarga.

- 2) Minimal usia 58 tahun.
- 3) Memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
- 4) Tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni.
- 5) Telah dihuni minimal 3 tahun.
- 6) Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir.
- 7) Memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- 8) Bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah dengan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Sementara itu, berikut adalah syarat penerima BSPS:

- 1) Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni.
- 2) Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding.
- 3) Terdapat kelengkapan komponen struktural bangunan.
- 4) Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.
- 5) Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah, seperti sertifikat: Petok D; Girik; Leter C; Pipil; NIB; Akta Hibah; Akta Jual Beli; Bukti izin menempati tanah ulayat dari kepala adat; Bukti izin menempati tanah milik perorangan, keluarga besar, lembaga; serta Bukti penguasaan tanah lainnya yang sah: surat keterangan (suket) pejabat terkait.

- 6) Memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
- 7) Tidak dalam status sengketa.
- 8) Sesuai tata ruang wilayah.
- 9) Surat pernyataan mengikuti program dan hasil identifikasi keswadayaan.

3. Kriteria Hunian Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. perencanaan dan perancangan rumah dilakukan salah satunya untuk menciptakan rumah yang layak huni. Berikut ini kriteria rumah layak huni yaitu:

a. Ketahanan dan keselamatan bangunan

Aspek Keselamatan Bangunan dalam konteks Rumah Layak Huni mengacu pada terpenuhinya syarat teknis bangunan agar aman bagi penghuninya, baik dari potensi keruntuhan struktur, kebakaran, maupun bencana alam (gempa, angin, banjir). Ketentuan ini merujuk pada Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 dan prinsip-prinsip teknis dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b. Kecukupan minimum luas bangunan

Kecukupan minimum luas bangunan merupakan salah satu indikator utama rumah layak huni yang bertujuan menjamin kenyamanan dan

kesehatan penghuni dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Luas minimum ini memperhitungkan kebutuhan ruang gerak, sirkulasi udara, serta fungsi dasar ruang seperti tidur, makan, dan berkegiatan. Menurut standar teknis dalam Kepmen Kimpraswil nomor 403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, batas minimum luas hunian yang layak adalah $7,2\text{m}^2$ per orang. Sementara itu, ukuran 9m^2 per orang merupakan standar ideal yang disarankan, dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah $2,8\text{m}$. Perbedaan $7,2$ dan 9m^2 ini terletak pada tingkat kelayakan ruang. Oleh karena itu, bagi pengembang perumahan, mengejar standar ideal seluas 9m^2 per orang menjadi langkah strategis untuk membangun kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan

c. Akses air minum layak

Air minum layak adalah air yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Penghuni harus memiliki akses mudah dan terjangkau terhadap sumber air yang memenuhi standar kualitas air minum, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Berikut ini Indikator Rumah Layak Huni dengan Akses Air Minum Layak yaitu:

- 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum layak
- 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah atau berada dalam jarak jangkauan 30 menit
- 3) Rumah tangga dapat mengakses air minum saat dibutuhkan (tersedia minimal 12 jam sehari)

- 4) Kualitas Air Minum bebas dari kontaminasi (tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat)

d. Akses sanitasi layak

Sanitasi layak adalah kondisi di mana rumah memiliki fasilitas sanitasi yang aman, higienis, tertutup, dan tidak mencemari lingkungan. Ini mencakup sistem pembuangan air limbah domestik dan limbah tinja yang efektif serta tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penghuni maupun masyarakat sekitar.

e. Pencahayaan dan penghawaan baik

Aspek pencahayaan dan penghawaan alami berkontribusi terhadap kenyamanan dan kesehatan penghuni. Rumah harus memiliki bukaan baik dengan jendela maupun ventilasi yang cukup agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan di siang hari dan sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik.

Selain itu, ada pula beberapa kriteria hunian tidak layak huni, meliputi:

- 1) Struktur atap rumah yang membahayakan penghuni, misalnya bocor, jebol, dan rapuh.
- 2) Rangka dan dinding rumah yang tidak layak sehingga tidak mampu melindungi penghuni.
- 3) Area lantai rumah yang masih berupa tanah.
- 4) Kurangnya ventilasi udara dan sumber pencahayaan alami ke dalam rumah.

- 5) Aspek utilitas tidak terpenuhi, ditandai dengan tidak adanya sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; lebih lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Dengan demikian, Program Bantuan Bedah Rumah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan, serta bagaimana

faktor-faktor pendukung maupun penghambat memengaruhi pencapaian tujuan program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori tentang Efektivitas menggunakan teori menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Mudiana dkk. (2024:17) yang mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu : (i) Pencapaian Tujuan; (ii) Integrasi; dan (iii) Adaptasi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

